

**RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2023**



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora

Jl. Blora – Cepu KM 5 Telp. (0296) 531078 Fax. (0296) 531078 BLORA 58261

Website : www.dindukcapil.blorakab.go.id. Email : dindukcapilkabblora@gmail.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	II-11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	II-13
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.....	II-16
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-29
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN.....	III.1
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	III.2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
4.1 Program dan Kegiatan.....	IV-4
BAB V PENUTUP.....	V-1

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
Nomor : 050/ /2022
Tanggal : _____

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2023 disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan program dan kegiatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sementara itu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2023 menjabarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota serta dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2023 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan tidak

terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Blora sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil bagi para penyelenggara di

lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun sebelumnya (tahun 2021) serta merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2023.
2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Blora ke dalam suatu strategi program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Menyusun kebijakan program/kegiatan dan indikasi kegiatan tahun 2023.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan program/kegiatan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Program/Kegiatan Non Urusan dan Program/ Kegiatan Urusan Wajib.

Program/kegiatan urusan wajib dilaksanakan melalui 4 Program, 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan dan Program Non Urusan OPD dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan.

Adapun rincian evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021, sebagai berikut :

1) Program Rutin

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator jumlah dokumen rencana kinerja dan penetapan kinerja dengan target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, indikator jumlah koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target 16 kali terealisasi 6 kali
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, indikator jumlah laporan koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target 16 laporan terealisasi 2 laporan
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator jumlah laporan evaluasi kinerja dengan target 4 laporan terealisasi 100%

- b) *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :*
- Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan, indikator dengan jumlah peserta sosialisasi 40 orang terealisasi 100%
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, indikator jumlahpeserta bimtek 30 orang terealisasi 100%
- c) *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah, dengan sub kegiatan :*
- d) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN 12 bulan terealisasi 100%*
- e) *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :*
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan dengan target 12 bulan terealisasi 100%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator pengadaan perlatan cetak KTP 2 paket terealisasi 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, indikator pemenuhan bahan logistik kantor dengan target 12 bulan terealisasi 100%
 - Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan, indikator pemenuhan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan terealisasi 100%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, indikator pemenuhan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan terealisasi 100%
 - Penyediaan Bahan/Material, indikator pemenuhan bahan/material dengan target 12 bulan terealisasi 100%
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu, indikator pemenuhan fasilitasi kunjungan tamu dengan target 12 bulan terealisasi 100%
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, indikator terlaksananya sosialisasi adminduk melalui media terealisasi 100%
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, indikator persentase dokumen rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti dan disepakati dengan target 100% terealisasi 100%

- f) *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :*
- Pengadaan Mebel, indikator jumlah mebel yang diadakan dengan target 4 unit terealisasi 100%
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikator jumlah peralatan yang diadakan dengan target 7 unit terealisasi 100%
- g) *Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :*
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator pemenuhan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan terealisasi 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator jumlah bulan layanan listrik, internet dan telepon perangkat daerah dengan target 12 bulan terealisasi 100%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, indikator persentase pemenuhan layanan jasa administrasi umum perkantoran dengan target 100% terealisasi 100%
- h) *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :*
- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikator jumlah kendaraan yang terpelihara dan terbayar pajak kendaraan dengan target 41 unit terealisasi 100%
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dengan target 37 unit terealisasi 100%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara dengan target 9 unit terealisasi 100%

2) Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- Program Pendaftaran Penduduk

- a) *Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan :*
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, indikator terbayarnya honor petugas front office 2 orang dan pengadaan ATK pelayanan terealisasi 100%

- **Program Pencatatan Sipil**

a) *Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan :*

- Peningkatan Pelayanan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, indikator tersedianya honor Tim Selintas dengan target 12 bulan terealisasi 100%

- **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

a) *Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan :*

- Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan, indikator pemeliharaan jaringan SIAK 17 TPDk terealisasi 100%

- **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

a) *Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, dengan sub kegiatan :*

- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota, indikator tersedianya Buku Induk Penduduk dengan target 410 buku terealisasi 100%
- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain, indikator tersedianya Buku Profil Kependudukan dengan target 146 buku terealisasi 100%

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Blora

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase peningkatan pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	27	20	4	4	100%	4	28	103,7%

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dalam penyusunan RKA SKPD	16	-	16	6	37,5%	12	18	112,5%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	60	50	20	2	10%	12	64	107%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	20	-	4	4	100%	4	8	40%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	60	48	12	12	100%	12	72	120%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	30	-	40	40	100%	0	40	133%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	30	-	30	30	100%	0	30	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum pada perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	60	48	3	3	100%	1	52	87%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	60	48	2	2	100%	-	50	83%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan bahan logistik kantor	60	48	12	12	100%	12	72	120%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	60	48	12	12	100%	12	72	120%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	48	12	12	100%	12	72	120%
	Penyediaan bahan/material	Jumlah bulan penyediaan ATK	12	-	12	12	100%	12	24	200%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan fasilitasi kunjungan tamu	12	-	12	12	100%	12	12	200%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	48	12	12	100%	12	72	120%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	-	12	12	100%	12	72	120%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan jasa surat menyurat	60	48	12	12	100%	12	72	120%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	48	12	12	100%	12	72	120%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	48	12	12	100%	12	72	120%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	60	48	12	12	100%	12	72	120%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraan	41	41	41	41	100%	41	41	100%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	34	20	4	4	100%	4	28	96%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	86	72	14	14	100%	14	14	132%
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	60	48	4	4	100%	4	56	93%

B.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KTP	98,90%	96,92%	98%	94,92%	94,92%	98,6%	98,6%	99,7%
		Cakupan kepemilikan KK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan kepemilikan KIA	98%	48,84%	70%	51,31%	73%	70,3%	70,3%	72%
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase kepemilikan KK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk	644,000	381.914	209,094	359.328	172%	164.050	545.964	81,3%
C.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	100%	97,57%	98%	98,08%	100,08%	99%	99%	99%
1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-1 tahun	100%	99,53%	99%	99,95%	115%	99,6%	99,6%	99,96%
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta catatan capil yang diterbitkan	100.000	49.993	20.000	17.992	90%	25.000	93.985	92,99%
D.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Database yang akurat	98%	-	93%	93%	100%	95%	95%	97%
1.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan	Persentase TPDK tang terhubung jaringan SIAK - Online	17	17	17	17	100%	17	17	100%
E.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase OPD dan lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan	60	100%	40	100%	100%	45%	45%	75%
1.	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	12 dok	10 dok	2 dok	2 dok	100%	2	14	117%

	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah BIP yang diterbitkan	2,460	2,050	410	410	100%	410	2870	110%
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Buku Profil yang diterbitkan	2,100	1,750	350	350	100%	350	2450	117%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021. Adapun indikator kinerja yang tertuang pada Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tahun 2017-2021, sebagai berikut:

Tabel 2.2

IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)
Misi 1 : Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik	
Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	1. Persentase bayi berakte kelahiran
	2. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun
	3. Persentase penduduk berKTP
	4. Persentase kepemilikan KIA

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Blora

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Proyeksi	Analisis Catatan
				2021	2021	2022	
1.	Persentase bayi berakte kelahiran			99	99,95	99,4	Sudah melebihi target
2	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	95		98	98,08	98,50	Sudah melebihi target
3	Persentase kepemilikan KTP			100	94,92	98,60	Hampir tercapai
4	Persentase kepemilikan KIA (Kartu Identitas anak)	20		98	51,31	70,20	Masih rendah

Dari table diatas dapat dilihat bahwa ada indikator kinerja yang belum memenuhi target. Kurangnya keberhasilan pencapaian indikator tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- 1) Masih ada penduduk yang belum melakukan perekaman KTP El.
Ini dapat dilihat dari jumlah wajib KTP tahun 2021 sebanyak : 710.245 dan yang sudah melakukan perekaman sebanyak 674.137 orang.
- 2) Indikator kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) pada tahun 2020, terealisasi 48,84%, dari jumlah anak usia 0-17 tahun : 207.735 yang sudah memiliki KIA : 108.658 anak.

Beberapa kendala yang menghambat keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan antara lain :

- Jaringan internet tidak stabil
- Pada masa pandemi, untuk mengurangi kerumunan dari Dinas Dukcapil tidak dapat melaksanakan pelayanan jemput bola, baik ke desa-desa maupun ke sekolah-sekolah. Untuk pelayanan dilaksanakan secara daring, mengoptimalkan program selintas dan warung Pakdhe.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD antara lain belum tersebarnya informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan

atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan terbitnya dokumen kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cakupan kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2021 yang belum memenuhi target.

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sangat mempengaruhi tujuan pertama yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi jangka menengah pembangunan Kabupaten Blora.

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Blora, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. *Optimalisasi Cakupan Data Base Kependudukan*

Data Kependudukan, merupakan kumpulan data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data penduduk, memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan, baik pembangunan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain.

Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersimpan di dalam data base kependudukan, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Hal tersebut diamanatkan di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Oleh karena data penduduk memiliki arti yang sangat strategis, setiap penduduk Kabupaten Blora harus tercatat dalam Data Base Kependudukan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.

Untuk meningkatkan kualitas data penduduk, setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, diharapkan dapat dilaporkan dan dicatat pada setiap tingkatan pemerintahan dan selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukan. Melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil setiap hari, data base kependudukan akan terjaga akurasinya.

2. Penerapan KTP Elektronik

Pada tahun 20223 penerapan KTP elektronik akan tetap menjadi kegiatan prioritas sehingga masyarakat memahami akan manfaat dan fungsinya serta secara sadar datang ke tempat pelayanan untuk mendaftarkan diri dan mendapat pelayanan KTP elektronik. Pelayanan KTP elektronik memasuki tahap reguler, dan akan lebih diarahkan kepada penduduk wajib KTP pemula yang baru berusia 17 tahun atau telah menikah.

Manfaat KTP elektronik adalah :

- a. Sebagai identitas jati diri, berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal dalam pengurusan berbagai kepentingan.
- b. Mencegah terjadinya pemalsuan dan KTP ganda.
- c. Dapat dipergunakan sebagai ID card dalam pembuatan ATM, asuransi dan lain-lain.
- d. Terciptanya akurasi data penduduk untuk mendukung program pembangunan lain.

3. Pencatatan Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan proses penting dalam membangun data base kependudukan yang akurat dan penerbitan aktakelahiran memberikan kepastian hukum akan status seseorang di dalam keluarga.

Kesadaran masyarakat di Kabupaten Blora dalam memiliki akta kelahiran sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan sampai dengan akhir Desember 2021, kepemilikan akta kelahiran bagi bayi lahir terealisasi 99,95%.

Beranjak dari permasalahan tersebut dan mengacu kepada Rencana Strategis Pencatatan Sipil Nasional, bahwa **”Semua anak Indonesia (usia 0-18 tahun) tercatat kelahirannya”**, terutama anak usia 0-5 tahun, kegiatan pencatatan kelahiran menjadi prioritas yang akan ditunjang dengan berbagai kegiatan sosialisasi.

Pelayanan penerbitan akta kelahiran terutama bagi bayi usia 0-60 hari, secara langsung dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah persyaratan terpenuhi secara lengkap. Untuk meningkatkan pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Puskesmas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada rancangan awal Rencana kerja 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusukan anggaran sebesar Rp. 14.270.088.000,- (empat belas milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Blora

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase peningkatan pelayanan PD	100%	11.496.088.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase peningkatan pelayanan PD		11.496.088.000	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Dinduk capil	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Dinduk capil	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dok	4.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinduk capil	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 lap.	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinduk capil	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 lap.	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.529.00.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.529.00.000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinduk capil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 org/bln	3.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinduk capil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 org/bln	3.500.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinduk capil	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dok	29.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinduk capil	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dok	29.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase Barang Milik Daerah yang teradministrasi dengan baik	100%	6.600.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase Barang Milik Daerah yang teradministrasi dengan baik	100%	6.600.000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	4 lap.	6.600.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	4 lap.	6.600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase pemenuhan administrasi umum pada perangkat daerah	100%	369.150.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase pemenuhan administrasi umum pada perangkat daerah	100%	369.150.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinduk capil	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinduk capil	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	25.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinduk capil	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	1 paket	180.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinduk capil	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	1 paket	180.000.000	

			disediakan					disediakan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinduk capil	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	10.750.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinduk capil	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	10.750.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinduk capil	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	30 dok	18.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinduk capil	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	30 dok	18.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinduk capil	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap.	135.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinduk capil	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap.	135.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinduk capil	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	5.736.450.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinduk capil	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	5.736.450.000	0
	Pengadaan Mebel	Dinduk capil	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 unit	83.200.000	Pengadaan Mebel	Dinduk capil	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 unit	83.200.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	153.250.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	153.250.000	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	5.500.000.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	5.500.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.579.888.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.579.888.000	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinduk capil	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap.	5.240.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		5.240.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinduk capil	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap.	180.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinduk capil	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap.	180.600.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinduk capil	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 lap.	447.300.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinduk capil	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 lap.	447.300.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinduk capil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap.	946.748.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinduk capil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap.	946.748.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	260.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	260.000.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinduk capil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraan	41 unit	135.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel	Dinduk capil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraan	41 unit	135.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Dinduk capil	Jumlah mebel yang terpelihara	40 unit	25.000.000	Pemeliharaan Mebel	Dinduk capil	Jumlah mebel yang terpelihara	40 unit	25.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	25 unit	80.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	25 unit	80.000.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinduk capil	Jumlah sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	20.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinduk capil	Jumlah sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	20.000.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinduk capil	Cakupan kepemilikan KTP	98,6%	1.240.000.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinduk capil	Cakupan kepemilikan KTP	98,6%	1.240.000.000	
			Cakupan kepemilikan KK	100%			Dinduk capil	Cakupan kepemilikan KK	100%		
			Presentase kepemilikan kata kelahiran anak usia 0-18 tahun	99%			Dinduk capil	Presentase kepemilikan kata kelahiran anak usia 0-18 tahun	99%		
			Cakupan kepemilikan KIA	70,3%			Dinduk capil	Cakupan kepemilikan KIA	70,3%		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah laporan dan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	164.050 dok	900.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah laporan dan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	16.050 dok	900.000.000	

	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan peristiwa kependudukan	4 dok	50.000.000	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan peristiwa kependudukan	4 dok	50.000.000	
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	50 org	20.000.000	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	50 org	20.000.000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	164.000 lap	150.000.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	164.000 lap.	150.000.000	
	Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	164.000 lap.	680.000.000	Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	164.000 lap.	680.000.000	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil			190.000.000	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil			190.000.000	
	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP El, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Dinduk capil	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	45.000 dok	190.000.000	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP El, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Dinduk capil	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	45.000 dok.	190.000.000	

	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah laporan dan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	10.020 dok.	150.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah laporan dan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	10.020 dok.	150.000.000	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah laporan sosialisasi pendaftaran penduduk	20 lap.	100.000.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah laporan sosialisasi pendaftaran penduduk	20 lap.	100.000.000	
	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk	Dinduk capil	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk	546.543 dok.	50.000.000	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk	Dinduk capil	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk	546.543 dok.	50.000.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinduk capil	Prosentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun	99,6 %	850.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinduk capil	Prosentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun	99%	850.000.000	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Prosentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-1 tahun	99,6 %	135.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Prosentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-1 tahun	99,6 %	135.000.000	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	15.000 layanan	60.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	15.000 layanan	60.000.000	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	Dinduk capil	Jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan	5 paket	75.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	Dinduk capil	Jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	5 paket	75.000.000	

			kebutuhan yang tersedia								
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah laporan dan dokumen pencatatan sipil	3.002 laporan	480.000.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah laporan dan dokumen pencatatan sipil	3.002 laporan	480.000.000	
	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	2 lap.	170.000.000	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	2 lap.	170.000.000	
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	6 lap.	280.000.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	6 lap.	280.000.000	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah sosialisasi yang terselenggara	6 lap.	30.000.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah sosialisasi yang terselenggara	6 lap.	30.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi layanan pencatatan sipil	25 kali	235.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi layanan pencatatan sipil	25 kali	235.000.000	
	Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dolumen kependudukan, formulir, dan buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dolumen kependudukan, formulir, dan buku untuk Pelayanan Pencatatan	6 dok	75.000.000	Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dolumen kependudukan, formulir, dan buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dolumen kependudukan, formulir, dan buku untuk Pelayanan Pencatatan	6 dok	75.000.000	

			Sipil					Sipil			
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil	12 lap.	35.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil	12 lap.	35.000.000	
	Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	2 lap.	125.000.000	Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	2 lap.	125.000.000	
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Prosentase OPD dan lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	28%	420.000.000	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Prosentase OPD dan lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	28%	420.000.000	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Database yang akurat	95%	380.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Prosentase OPD dan lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	95%	380.000.000	
	Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	15.000.000	Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	15.000.000	
	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	300.000.000	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	300.000.000	

	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	40.000.000	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	40.000.000	
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dinduk capil	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	255.000 dokumen	25.000.000	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dinduk capil	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	255.000 dokumen	25.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Persentase pelaksanaan monev	100%	40.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Persentase pelaksanaan monev	100%	40.000.000	
	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	16 laporan	40.000.000	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	16 laporan	40.000.000	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinduk capil	Prosentase OPD dan lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan	45%	264.000.000	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinduk capil	Prosentase OPD dan lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan		264.000.000	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah dokumen yang diterbitkan	2 dok	264.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah dokumen yang diterbitkan	2 dok	264.000.000	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Dinduk capil	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota	478 buku	132.000.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Dinduk capil	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota	478 buku	132.000.000	

	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lain	Dinduk capil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	370 buku	132.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lain	Dinduk capil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	370 buku	132.000.000	
--	------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Blora.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2023/2024 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemutakhiran Data Penduduk.
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Penerapan KTP elektronik.
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya".

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan reguler. Diawali pada tahun 2012 dengan langkah-langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **"Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel"**, dengan tujuan **"Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan catatan sipil"**.

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta catatan sipil
3. Meningkatnya kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil yang valid, akuntabel dan akurat

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas data base kependudukan
- 2) Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan
- 5) Meningkatkan penataan dokumen kependudukan

2. Sasaran Renja SKPD

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengolahan data berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang transparan dan profesional sesuai Standar Operasional Prosedur.
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, memiliki integritas dan profesional.
- 4) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan
- 5) Meningkatnya pengelolaan dokumen kependudukan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 adalah :

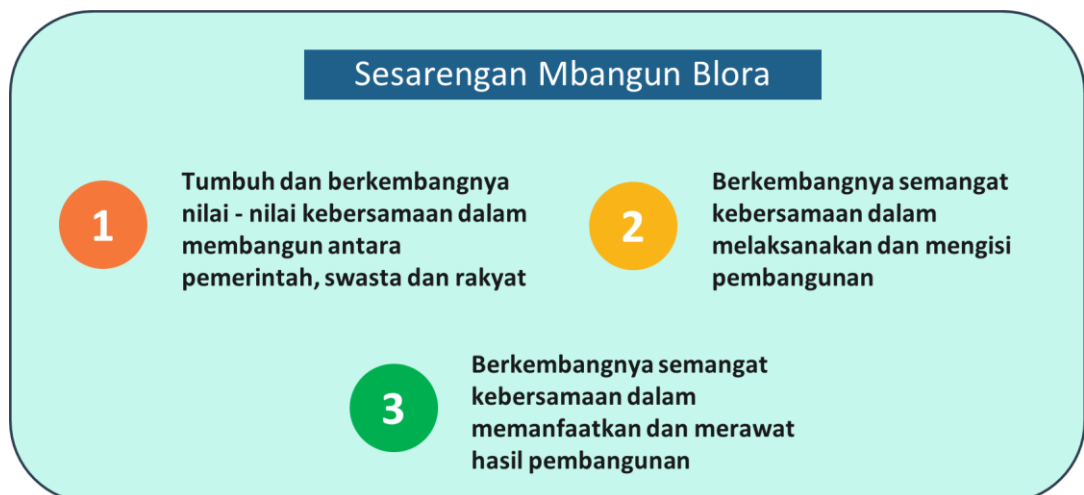


Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing

Visi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu:

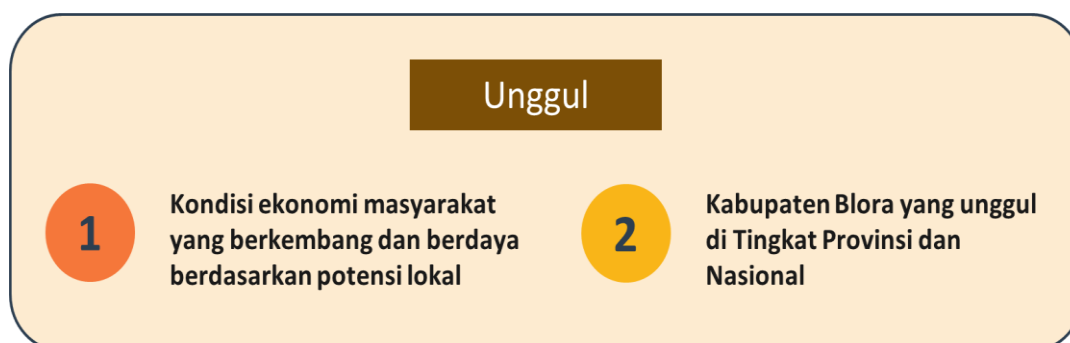
1. Sesarengan Mbangun Blora

Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



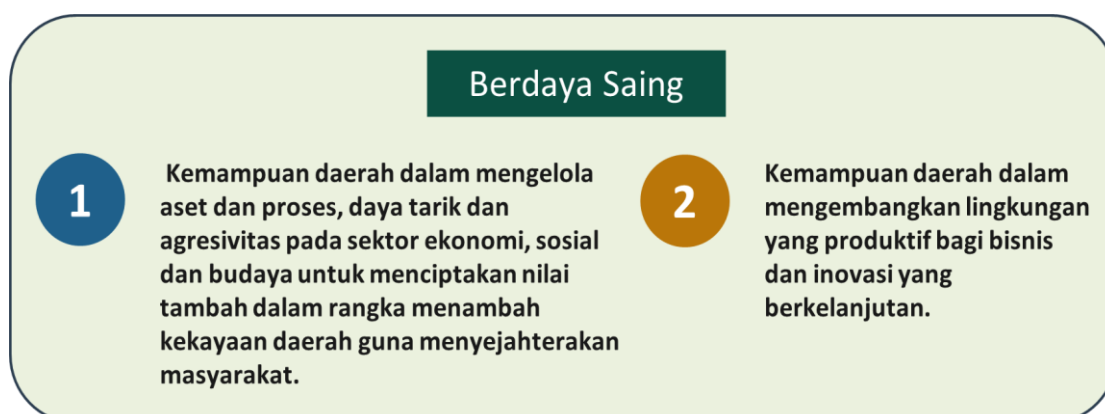
2. Unggul

Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



3. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **“Mewujudkan birokrasi yang**

profesional, progresif, bersih dan akuntabel”, dengan tujuan **“Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan catatan sipil”**.

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta catatan sipil
3. Meningkatnya kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil yang valid, akuntabel dan akurat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dihadapkan pada kendala di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian tugas.

Peluang tersebut diantaranya adalah :

1. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
2. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan database Kependudukan

Ada beberapa kendala yang menghambat keberhasilan pencapaian indikator yaitu karena masa pandemi covid 19, untuk mengurangi kerumunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengurangi pelayanan tatap muka maupun pelayanan mobile/keliling ke desa-desa maupun di sekolah-sekolah. Untuk pelayanan dilaksanakan secara daring.

Program dan kegiatan pada tahun 2023, dikelompokkan ke dalam Program/Kegiatan Rutin SKPD dan Program/Kegiatan Urusan Wajib.

4.1.Rencana Program dan Kegiatan :

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora telah melaksanakan pemutakhiran program kegiatan tahun 2023 yang disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Semua proses pemutakhiran ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 untuk perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tahun 2023 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pendaftaran Penduduk

- 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
 - b. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
 - c. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - d. Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- 2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
- 3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan :
 - a. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
 - b. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Penafataran Penduduk

C. Program Pencatatan Sipil

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 - b. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El, Formulir, dan Buku Terkait Penatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
 - b. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
 - c. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - a. Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
 - c. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Admiistrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - c. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - d. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan :
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
 - b. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Usulan pagu anggaran untuk rencana program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tahun 2023 sebesar 14.270.088.000,- (empat belas milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 (hasil input di SIPD) sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Blora
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	12						14,270,088,000						22,987,000,000		
2	12	01					11,496,088,000						11,531,400,000		
2	12	01	2.01				15,000,000						12,000,000		
2	12	01	2.01	01											
2	12	01	2.01	06											
2	12	01	2.02				3,529,000,000						3,630,000,000		
2	12	01	2.02	01											
2	12	01	2.02	02											

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Blora
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 12 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang teradministrasi dengan baik	%		%	100 %	6,600,000					100 %	7,000,000		
2 12 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	6,600,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	4 Laporan	7,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum pada perangkat daerah	%		%	100 %	369,150,000					100 %	341,400,000		
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	1 Paket	8,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	180,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	1 Paket	162,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,750,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	1 Paket	12,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	18,400,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	30 Dokumen	19,400,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	135,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih	Dindikcapil	12 Laporan	140,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Blora
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah	%		%	100 %	5,736,450,000						100 %	5,720,000,000	
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	83,200,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	6 Unit	85,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	153,250,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	10 Unit	135,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit 0 Unit	5,500,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	1 unit 0 Unit	5,500,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	1,579,888,000						100 %	1,623,000,000	
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,240,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	12 Laporan	6,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	180,600,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	12 Laporan	185,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Blora
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	447,300,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	4 Laporan	500,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	946,748,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	12 Laporan	932,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	260,000,000						100 %	198,000,000	
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	135,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	41 Unit	95,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 40 Unit	25,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	0 Unit 40 Unit	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 25 Unit	80,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	0 Unit 25 Unit	53,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Dindikcapil	1 Unit	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN	Cakupan kepemilikan KIA	%		%	70,3 %	1,240,000,000						70,3 %	1,165,100,000	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Blora
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KK Cakupan kepemilikan KTP Prosentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 Tahun	% % %		% % %	100 % 98,6 % 99 %						100 % 98,6 % 99 %			
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan dan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk Prosentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-1 tahun	dok %		dok %	164050 dok 99,6 %	900,000,000					164050 dok 99,6 %	925,000,000		
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan				0 Dokumen 4 dokumen	50,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	0 Dokumen 4 dokumen	75,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 02 2.01 03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian pendaftaran penduduk				0 Orang 50 orang	20,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	0 Orang 50 orang	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk				0 Laporan 164000 laporan	150,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	0 Laporan 164000 laporan	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 02 2.01 07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa				164000 laporan 0 Laporan	680,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	164000 laporan 0 Laporan	680,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Blora
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kependudukan													
2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						190,000,000						190,000,000		
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTPeI, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				45000 dokumen 0 Dokumen	190,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	45000 dokumen 0 Dokumen	190,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														
2 12 02 2.03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	dok		dok	10020 dok	150,000,000						10020 dok	50,100,000	
2 12 02 2.03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk				20 laporan	100,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	20 laporan	100,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 02 2.03 08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia				546543 dokumen 0 Dokumen	50,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	546543 dokumen 0 Dokumen	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil														
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 Tahun	%		%	99 %	850,000,000						99 %	805,000,000	
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-1 tahun	%		%	99.6 %	135,000,000						99.6 %	145,000,000	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Blora
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				15000 Layanan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat kab Blora	15000 Layanan	70,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03 2.01 05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-et, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				5 paket 0 Paket	75,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat kab Blora	5 paket 0 Paket	75,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan dan Dokumen Pencatatan Sipil	Laporan		Laporan	3002 Laporan	480,000,000						3002 Laporan	420,000,000	
2 12 03 2.02 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan 0 Laporan	170,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	2 Laporan 0 Laporan	85,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03 2.02 06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				6 Laporan 0 Laporan	280,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	6 Laporan 0 Laporan	300,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Blora
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 03 2.02 08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				6 laporan 0 Laporan	30,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	6 laporan 0 Laporan	35,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pembinaan, monitoring, dan evaluasi layanan pencatatan sipil	kali		kali	25 kali	235,000,000						25 kali	240,000,000	
2 12 03 2.03 01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil jumlah pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-EL, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuha yang tersedia				0 Dokumen 6 dok	75,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	0 Dokumen 6 dok	75,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03 2.03 02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				12 Laporan 0 Laporan	35,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	12 Laporan 0 Laporan	40,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03 2.03 04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan 0 Laporan	125,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	2 Laporan 0 Laporan	125,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase OPD dan lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%		%	28 %	420,000,000						28 %	552,000,000	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Blora
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Database yang akurat	%		%	95 %	380,000,000					95 %	502,000,000		
2 12 04 2.03 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	15,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	2 Laporan	17,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	12 Laporan	350,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	40,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	2 Laporan	75,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 04 2.03 08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				255000 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	255000 Dokumen	60,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 04 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pelaksanaan movev uk ukku	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	40,000,000					100 % 100 % 100 %	50,000,000		
2 12 04 2.04 01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				16 Laporan	40,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	16 Laporan	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase OPD dan lembaga yang memanfaatkan profil	%		%	45 %	264,000,000					45 %	275,000,000		

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Blora
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		kependudukan													
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	dok		dok	2 dok	264,000,000					2 dok	275,000,000		
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				0 Dokumen 478 buku	132,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	0 Dokumen 478 buku	140,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				370 buku 0 Dokumen	132,000,000	Kab. Blora, Jepon, Jepon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	370 buku 0 Dokumen	135,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TOTAL							14,270,088,000						22,987,000,000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2023 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2023 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2020-2031, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2023 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN